
ARTICLE

Model Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi di Taman Wisata Alam Wira Garden)

Delta Pramesti^{1*}, Eko Budi Sulistio², Dewi Brima Atika³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Pramesti, D., Sulistio, E.B, Atika, D.B., (2022) Model Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi di Taman Wisata Alam Wira Garden). *Administrativa* (4) 1

Article History

Diterima: 16 Oktober 2021

Ditetapkan: 6 Maret 2022

Keywords:

Collaborative Governance, Stakeholders, Tourism

Kata Kunci:

Collaborative Governance, Stakeholder, Wisata

ABSTRACT

Collaborative governance is an activity that involves several related parties. These parties are partners or partners or stakeholders in cooperation to achieve goals with mutually beneficial mutual agreements. This effort is to develop tourism potential in the Wira Garden Nature Tourism Park. This study aims to contribute to knowledge related to collaborative governance in developing tourism potential in the Wira Garden Tourism Park and to identify the factors encountered in developing the tourism potential in the Wira Garden Nature Tourism Park. The type of research used in this research is qualitative research. The results showed that in the collaborative process carried out in developing tourism potential at the Wira Garden Natural Tourism Park, namely: (1) face to face or face-to-face dialogue in developing tourism potential that has involved the government, community, and managers by holding meetings directly or indirectly. directly in the form of a deliberation forum. (2) Trust building or building trust by being quick to make some interactions with the community so that they are sympathetic and want to help develop tourism potential. (3) Commitment to process or commitment to the collaborative process in developing tourism that has involved the community and government in the development process. (4) share understanding or understanding of joint decisions with all existing decisions taken and based on available rules. Every problem is found a point of resolution through deliberation to reach a consensus.

ABSTRAK

Collaborative governance adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut adalah mitra atau partner atau stakeholder dalam kerjasama untuk mencapai tujuan dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Upaya yang dilakukan ini adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kontribusi terhadap pengetahuan terkait collaborative governance dalam mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Wira Garden dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dihadapi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden yaitu: (1) face to face atau dialog tatap muka dalam mengembangkan potensi wisata yang telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) Trust building atau membangun kepercayaan dengan adanya sigap melakukan beberapa interaksi dengan pihak masyarakat agar simpati dan ingin membantu dalam pengembangan potensi pariwisata. (3) Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengembangkan wisata yang telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya. (4) share Understanding atau pemahaman atas keputusan bersama dengan segala keputusan yang ada diambil dan di dasarkan pada aturan yang tersedia. Setiap masalah yang datang ditemukan titik penyelesaiannya melalui musyawarah mencapai suatu mufakat.

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sumber nilai ekonomi yang memiliki kemampuan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Secara ekonomi, potensi wisata dapat memberikan uang tunai bagi pemerintah daerah. Selain itu, kehadiran industri pariwisata dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar serta manajemen dan pemerintah daerah. Potensi pariwisata di Indonesia sangat sederhana untuk dikembangkan dengan meningkatkan infrastruktur, keamanan, dan kemampuan manajemen untuk membangun industri pariwisata yang diminati oleh pengunjung domestik dan internasional yang mencari perasaan terpenuhi. Melalui pengembangan potensi wisata nasional yang beragam, industri pariwisata juga dapat menghasilkan kegiatan ekonomi, antara lain pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah, dan keuntungan devisa. Pertumbuhan sektor pariwisata memerlukan peran serta aktif masyarakat, khususnya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Semakin aktif masyarakat terlibat dalam kegiatan wisata, semakin banyak prospek pekerjaan yang akan ada; pemerintah berupaya melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan ekonomi. Dalam mengupayakan partisipasi masyarakat, pemerintah perlu memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut dan memberikan pengarahan atau petunjuk sehingga masyarakat mengetahui perannya. Namun, proses pengembangan pariwisata bukan hanya dari partisipasi masyarakat saja, tetapi juga seluruh pihak, termasuk Pemda serta pihak swasta.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat melimpahkan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus wilayah darat dan laut secara mandiri. Tujuannya adalah untuk mempercepat kemakmuran dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia di setiap daerah. Kebijakan tersebut dibuat agar setiap daerah dapat mengelola sumber dayanya sendiri, baik alam maupun manusia.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Banyaknya tempat wisata yang prospektif di Kota Bandar Lampung, yang harus menjadi tujuan yang lebih baik di Indonesia karena medan pegunungan yang tinggi dan dataran rendah dengan pantai berorientasi pariwisata. Semua Tempat Wisata di Bandar Lampung masih dikendalikan pemerintah melalui Dinas Pariwisata termasuk Taman Wisata Alam Wira Garden. Berikut beberapa jenis wisata yang terdapat di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Jenis-Jenis Wisata di Kota Bandar Lampung

No.	Jenis Wisata	Jumlah
1.	Wisata Alam	13
2.	Wisata Budaya	20
3.	Wisata Buatan	21

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan tabel 1, Seperti dapat dilihat, Bandar Lampung menawarkan banyak kemungkinan wisata, termasuk wisata alam, budaya, dan buatan; nama-nama kunjungan termasuk dalam lampiran. Wisata alam menyuguhkan keindahan alam yang mempesona, namun wisata budaya menciptakan citra tersendiri melalui budaya, seperti museum di jantung kota Bandar Lampung, pusat kerajinan filter, pusat kuliner kripik pisang, dan berbagai sanggar seni. Bandar Lampung memang memiliki banyak potensi wisata, namun belum semuanya diakui oleh pemerintah.

Banyaknya tempat wisata di Bandar Lampung berpotensi menjadi investasi ekonomi yang signifikan di masa depan, baik bagi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sekitar kawasan obyek wisata. Implementasi lokasi wisata daerah yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam pengembangan potensi wisata Bandar Lampung. Banyak pelaku yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, antara lain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sumber daya manusia, program, pendanaan, dan fasilitas. Tujuan tersebut harus dapat dicapai secara maksimal melalui administrasi dan eksploitasi yang baik dan terkoordinasi, baik di pihak pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan keterlibatan dalam pengembangan pariwisata (Subarsono, 2016). Berbagai potensi wisata, seperti pantai dan taman wisata, telah didirikan di Kota Bandar Lampung, yang kemudian berkembang menjadi daerah tujuan wisata, menunjukkan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu sektor dengan potensi terbesar untuk pengembangan ekonomi.

Taman Wisata Alam Wira Garden yang terletak di Desa Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata di Kota Bandar Lampung. Taman Wisata Alam Wira Garden berukuran 13 hektar. Taman wisata ini memulai debutnya sebagai objek wisata alam pada tahun 2007. Taman Wisata Alam Wira Garden terletak 7 kilometer dari inti taman, atau sekitar 30 menit dengan sepeda motor.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata harus diarahkan untuk mencapai dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya dalam rangka mengembangkan objek dan daya tarik wisata serta mewujudkan pariwisata menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Peraturan Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata lebih lanjut mengatur bahwa pengembangan dan pertumbuhan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pariwisata daerah, sehingga memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Collaborative Governance). Untuk memaksimalkan potensi wisata, pengembangan harus direncanakan dengan baik agar dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat dan pemerintah. Pembangunan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Seiring dengan arsitektur rencana, harus mampu menyediakan infrastruktur, administrasi, dan keamanan yang cukup dalam proses mempromosikan pariwisata yang menarik domestik dan internasional. Dalam hal ini, diperlukan peran aktif entitas pemerintah dan non-pemerintah dalam berkolaborasi untuk memastikan pariwisata berjalan dengan lancar, karena tata kelola

collaborative governance mengharuskan pemerintah dan non-pemerintah untuk bekerja sama untuk memastikan pariwisata berkembang sesuai harapan dan memberikan manfaat.

Keberhasilan dalam melakukan pengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden ini sangat bergantung dari perspektif pekerjaan masing-masing elemen, dengan mempertimbangkan program dan komponen anggaran saat ini. Karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya, pemerintah terpaksa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam masyarakat maupun dengan pihak luar, untuk mencapai suatu tujuan. Dapat dikatakan suatu lokasi wisata belum dapat berkembang secara efektif, baik oleh masyarakat di sekitarnya maupun oleh pihak pengelola dan pemerintah. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menopang atraksi Taman Wisata Alam Wira Garden, seperti transportasi dari pusat kota ke tempat tujuan wisata, masih kurang. Fasilitas Taman Wisata Alam Wira Garden yang ada saat ini masih dapat dikatakan kurang, padahal keberadaan fasilitas yang sesuai atau mendukung dapat mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pendapatan di objek wisata Taman Wisata Alam Wira Garden. Pertumbuhan objek wisata menghadapi kendala tambahan, seperti kurangnya keuangan untuk pengembangan pariwisata, seperti yang ditunjukkan oleh keadaan objek wisata yang rusak pada jalan untuk akses menuju lokasi objek wisata yang berada di daerah Teluk Betung. Oleh karena itu, diperlukannya *Collaborative Governance* dalam mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden untuk membuat sebuah perencanaan yang semakin baik dalam hal sarana maupun prasana lainnya untuk mendukung sektor pariwisata karena pariwisata merupakan salah sektor yang berkembang pesat sehingga mampu menunjang kehidupan di suatu negara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Istilah dalam kerjasama pada pemerintah yaitu *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai melibatkan pihak non-pemerintah. Kolaborasi digambarkan sebagai kolaborasi, kompromi, dan interaksi berbagai pihak terkait, termasuk orang dan organisasi, yang dilakukan oleh sektor pemerintah dan non-pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Ansel dan Gash (2008) *collaborative governance* adalah sistem pemerintahan dimana entitas publik dan kelompok non-pemerintah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan formal, yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus, dan di mana tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik didefinisikan dengan jelas. Seperti halnya kemitraan dalam pertumbuhan pariwisata Taman Wisata Alam Wira Garden.

Kerjasama merupakan tahap perkembangan, menurut model proses kolaborasi. Menurut Ansell & Gash (2008) proses kolaboratif tergantung pada membangun siklus komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman yang baik.

1. Dialog tatap muka (*Face to Face*), *Collaborative governance* berfokus pada pertemuan tatap muka di antara para pemangku kepentingan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan, dengan penekanan pada keramahan. Pemangku kepentingan harus terlibat dalam diskusi langsung untuk mengungkap kemungkinan yang saling menguntungkan. Tatap muka adalah teknik yang menanamkan kepercayaan pada kemampuan program untuk berfungsi secara keseluruhan. Pertemuan tatap muka diadakan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, pemahaman, dan komitmen terhadap proses tersebut.

2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*), Pendekatan kolaboratif lebih dari sekadar tawar-menawar; ini juga tentang mengembangkan kepercayaan. Membangun kepercayaan adalah proses yang berbeda dari wacana dan kesepakatan tentang isu-isu substantif. *Trust Building* merupakan langkah di mana para pemangku kepentingan membangun proses saling pengertian dalam rangka membentuk komitmen untuk berkolaborasi.
3. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*), Komitmen terkait dengan motivasi untuk partisipasi tata kelola kolaboratif. Komitmen terhadap proses memerlukan itikad baik menegosiasikan pandangan bahwa pendekatan terbaik untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan adalah melalui keuntungan bersama, dan memerlukan kesediaan untuk terlibat dalam diskusi.
4. Sikap saling memahami (*Share Understanding*), Pemahaman bersama tentang pilihan bersama memerlukan kesepakatan tentang deskripsi masalah dan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. keselarasan strategi dan nilai.

Teori *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2008) dipilih karena peneliti ingin mempelajari dan menilai proses tata kelola kolaboratif yang terlibat dalam penciptaan potensi wisata Taman Wisata Wira Garden. Kajian ini penting karena bertujuan untuk memberikan gambaran, umpan balik, dan saran kepada para pemangku kepentingan yang terlibat untuk membantu mereka lebih memperkuat tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pembangunan.

Konsep Pariwisata

Menurut *World Tourism Organization* (WTO) dalam Pitana (2009) pariwisata ialah tindakan individu atau sekelompok individu yang pergi ke atau tinggal di suatu lokasi di luar wilayah terdekatnya untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, atau tujuan lain.

Pariwisata dalam pengertian modern adalah fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu sebagai akibat dari kebutuhan akan kesehatan dan perubahan udara, kesadaran dan tumbuhnya kecintaan terhadap keindahan alam, dan khususnya sebagai akibat dari meningkatnya pergaulan berbagai bangsa dan golongan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan perdagangan dan industri, serta peningkatan moda transportasi (Irawan, 2010:11).

Menurut Pearce (1981:12) pengembangan pariwisata bisa didefinisikan sebagai sarana melengkapi atau meningkatkan prasarana dan pelayanan masyarakat. Konsep pengembangan pariwisata harus mampu mengembangkan gaya produk dalam hal daya tarik, diferensiasi dari objek lain, amenities wisata, akomodasi dan sarana transportasi, telekomunikasi, dan layanan pendukung lainnya. Dengan demikian, pengembangan pariwisata dapat bersifat luas, karena tidak hanya mencakup atraksi wisata tetapi juga fasilitas dan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, perumahan, dan layanan lainnya.

Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada potensi pengembangan objek wisata yang efektif, yang meliputi kelayakan finansial, kelayakan sosial ekonomi daerah, kelayakan teknis, dan kelayakan lingkungan. Selain itu, pertumbuhan pariwisata terkait erat dengan tren politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan. Oleh karena itu, sebelum memulai pengembangan wisata, diperlukan perencanaan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan anggaran yang tersedia.

Keterlibatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein (1969) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat identik dengan kekuatan masyarakat (partisipasi warga adalah kekuatan warga). Keterlibatan masyarakat dinilai menurut gradasi otoritas yang ditunjukkan dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata ialah sesuatu yang utama karena masyarakat sendiri yang lebih memahami dan mengetahui potensi yang ada di wilayahnya sendiri. Potensi yang dimiliki baik dari kondisi alam, geografis dan kebudayaan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi kearifan atau daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Masyarakat juga memiliki kesempatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan seperti dengan menyampaikan saran atau pendapat dalam pengambilan keputusan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Masyarakat memiliki partisipasi dalam pembangunan yang didapat sebagai dukungan masyarakat untuk berkontribusi secara finansial atau melalui tenaga kerja untuk pengeluaran pembangunan. Kolaborasi yang erat antara perencanaan dan masyarakat diperlukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dicapai. Keterlibatan masyarakat dapat diukur dengan kesediaan masyarakat untuk menanggung pengeluaran pembangunan atau adanya kemauan masyarakat dalam melestarikan dan menggali potensi pariwisata di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, keterlibatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan pengembangan dimulai dengan pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, merancang program, dan mengevaluasi. Dengan adanya keterlibatan dari warga, peningkatan kapasitas sebagai tolak ukur keberhasilan pengembangan.

C. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif dalam pengembangan tesis ini, dan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif agar lebih tepat, terbuka, dan menyeluruh mencirikan skenario yang akan diamati di lapangan untuk mengetahui bagaimana proses Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi di Taman Wisata Alam Wira Garden dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden.

Informan atau narasumber dalam penyusunan skripsi ini adalah diambil secara tidak acak (non random), dalam artian Informan atau narasumber sudah ditentukan terlebih dahulu pada saat penyusunan proposal atau sebelum turun lapangan melakukan penelitian, Sedangkan teknik dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan Metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi – potensi yang ada di Taman Wisata Alam Wira Garden

Hasil dan pembahasan memperlihatkan Taman Wisata Alam Wira Garden memiliki potensi yaitu :

1. Pemandangan Alam, Taman Wisata Alam Wira Garden merupakan sebuah daya tarik tersendiri yang memiliki keunikan, keaslian dan kelangkaan yang artinya Taman Wisata Alam Wira Garden mempunyai pemandangan alam berupa taman dan sungai yang berada di bawah taman tersebut.
2. Fasilitas, Fasilitas merupakan sebuah hal penting di dalam sebuah tempat wisata. Fasilitas menjadi salah satu potensi wisata yang dapat membuat wisatawan senang dan nyaman. Guna memberikan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan pengunjung ketikaberada di Taman Wisata Alam Wira Garden, maka dibangun berbagai fasilitas

wisata untuk menunjang sebuah obyek wisata. Fasilitas tersebut berupa kantor informasi, kantin, tempat parkir, tempat ibadah, MCK, pondokan, arena bermain anak-anak, *cottage* atau penginapan.

3. Aksesibilitas, Jarak tempuh dari pusat Kota Bandar Lampung menuju lokasi Taman Wisata Wira Garden sekitar ± 8 km. Dengan ini menunjukkan bahwa jarak tempuh ke Taman Wisata Alam Wira Garden masih cukup terjangkau oleh para wisatawan yang ingin berkunjung. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dengan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, juga tidak jauh dari kawasan pusat Kota Bandar Lampung. Kondisi jalan aspal yang akan dilalui menuju ke lokasi, karena kurang perhatian dari pemerintah serta akibat kelebihan beban.

Keterlibatan Para Stakeholder dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Taman Wisata Alam Wira Garden

Pemerintah, urusan publik sekarang dapat dikelola secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat. Melalui pemerintahan kolaboratif, pemerintah kehilangan hegemoninya dan melembagakan demokrasi dalam pemerintahan. pemerintahan. Taman Wisata Alam Wira Garden masih perlu memerlukan perhatian khusus dari pihak pemerintah terkait anggaran APBD untuk menambah fasilitas umum seperti tempat parkir, mushola, toilet, dan lain-lain.

Sedangkan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam pengembangan pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Masyarakat harus mampu membantu pemerintah, dalam hal ini masyarakat tidak boleh mementingkan diri sendiri. Partisipasi pada pengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden perlu melibatkan pihak swasta atau yang lainnya.

Proses Pengembangan Potensi Pariwisata Potensi Pariwisata Taman Wisata Alam Wira Garden

Collaborative Governance merupakan proses kerjasama antar para *stakeholder* yang terkait yaitu pihak pemerintah dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan masyarakat sekitar Taman Wisata Alam Wira Garden dalam mengembangkan potensi objek wisata tersebut. Sesuai fokus yang digunakan oleh peneliti yang menggunakan Model *Collaborative Governance* Ansel & Gash (2008), yang akan dijelaskan bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mengembangkan potensi pariwisata Taman Wisata Alam Wira Garden yaitu:

1. *Face to Face* (Dialog Tatap Muka), komunikasi melalui *face to face* antara pihak pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan pihak masyarakat yang mengelola tempat Taman Wisata Alam Wira Garden berjalan dengan baik. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan pihak masyarakat yang mengelola tempat Taman Wisata Alam Wira Garden saling memberikan informasi dalam upaya pengembangan Taman Wisata Alam Wira Garden. Peneliti melihat disini bahwa dalam menjalankan kolaborasi di Pengembangan Potensi Pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden mengedepankan koordinasi melalui komunikasi antar *stakeholder*.
2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), proses kolaborasi sangat dibutuhkan sebuah membangun kepercayaan agar semua pihak terlibat dalam membangun potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dengan sigap melakukan beberapa interaksi dengan pihak masyarakat agar simpati dan ingin membantu dalam pengembangan potensi pariwisata. Membangun kepercayaan telah berjalan dengan baik dapat dilihat dari pihak masyarakat yakin bahwa pekerjaan

yang ditawarkan dapat membantu menunjang kehidupan masyarakat yang bekerja di Taman Wisata Alam Wira Garden.

3. *Commitment to process* (Proses dalam mencapai komitmen), Komitmen yang telah menggambarkan bahwa *stakeholder* telah patuh dalam menjalankan kolaborasi dengan kesepakatan bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa proses dalam melaksanakan komitmen telah berjalan dengan baik sesuai dengan bukti dan temuan peneliti serta memantau perkembangan potensi jalannya kolaborasi di Taman Wisata Alam Wira Garden.
4. *Share understanding* (Pemahaman atas keputusan bersama), pemahaman atas keputusan dalam pengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden yang telah berjalan baik. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang ada diambil dan didasarkan pada aturan yang tersedia. Setiap masalah yang datang ditemukan titik penyelesaiannya melalui musyawarah mencapai suatu mufakat. Pihak pengelola Taman Wisata Alam Wira Garden telah melaksanakan segala tugas dan kewajibannya dalam menjalankan kolaborasi yang terjalin dan mengedepankan pemahaman atas keputusan secara bersama.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden

Faktor pendukung

1. Potensi Daerah, Faktor pendukung yang pertama dalam kolaborasi ini adalah tersedianya potensi daerah untuk berkolaborasi. Pengembangan objek wisata Taman Wisata Alam Wira Garden memiliki potensi yang banyak salah satunya memiliki sungai di bawah taman. Keberadaan tersebut sangat dimanfaatkan oleh pihak pengelola, masyarakat dan pihak pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden.
2. Peran Aktif Masyarakat
Faktor pendukung yang kedua mengenai peran aktif masyarakat. Tersedianya masyarakat maka akan membantu proses berjalannya kolaborasi di Taman Wisata Alam Wira Garden. Masyarakat selakupendukung dalam pengembangan potensi wisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Masyarakat yang ada di sekitar wilayah Taman Wisata Alam Wira Garden mendukung positif terhadap pengembangan ini sebab masyarakat dapat bekerja di tempat tersebut dan dapat memperkenalkan wilayah Batu Putuk yang telah mempunyai wisata serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Sarana Prasarana Belum Memadai. Faktor penghambat pertama mengenai sarana dan prasarana yang belum mencukupi. Sarana yang belum mencukupi seperti mushola, ruang ganti, tempat sampah dan parkir kendaraan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana telah terpenuhi dan segala kekurangantelah tertutupi maka sebagai *stakeholders* pun akan semangat untuk menjalankan kolaborasi.
2. Keterbatasan Anggaran, Faktor penghambat yang kedua mengenai keterbatasan anggaran dari pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga perbaikan fasilitas menjadi kurang maksimal. Anggaran merupakan aspek penting untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantupelaksanaan manajemen.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan 1) Proses Pengembangan Potensi Pariwisata Taman Wisata Wira Garden Dalam Persepektif Collaborative Governance yaitu: Face to Face (Dialog Tatap Muka), Proses Dialog Tatap Muka berupa komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah, ketika terjadi permasalahan di Taman Wisata Alam Wira Garden masyarakat langsung memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pemerintah. Trust Building (Membangun Kepercayaan), Masyarakat diberikan izin kepada pemerintah untuk mengelola tempat wisata tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan syarat pihak masyarakat harus memberikan laporan kepada pemerintah terkait pengelolaan objek wisata tersebut. Commitment to Process (Proses dalam Mencapai Komitmen), Dalam mencapai komitmen, masyarakat harus ingat bahwa memiliki kerjasama yang dilakukan dengan pihak pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata yang artinya pihak masyarakat harus mematuhi segala komitmen yang telah dibuat dengan pihak pemerintah. Share Understanding (Pemahaman Atas Keputusan Bersama), Segala keputusan yang diambil bersama baik dari masyarakat itu sendiri maupun pihak pemerintah, masalah yang terjadi harus ditemukan titik penyelesaiannya dengan cara melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Berkontribusi dalam pengembangan potensi wisata di Taman Wisata Alam Wira Garden adalah potensi daerah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan dan membangun objek wisata yang lebih baik dan menarik perhatian pengunjung. Sedangkan kendala yang menghambat pengembangan potensi wisata Taman Wisata Alam Wira Garden antara lain sarana dan prasarana yang belum memadai, serta keterbatasan anggaran yang menghambat proses pembangunan objek wisata Taman Wisata Alam Wira Garden.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki saran yang perlu disampaikan 1) Akan lebih baik jika pertemuan tatap muka antar *stakeholder* dijadwalkan. Jadwal pertemuan yang disusun dapat berisi agenda seperti kegiatan diskusi terkait program pengembangan potensi pariwisata, evaluasi *stakeholder* terhadap pengembangan potensi, 2) Lebih terbukanya masyarakat terhadap pemerintah dan dari pemerintah juga harus lebih mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan-batasan yang ada dari tugas, fungsi dan wewenang sebuah instansi serta mencarikan jalan keluar atau alternative lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan 3) Setiap *stakeholder* harus memahami setiap permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Penting untuk melakukan monitoring dan diskusi secara berkelanjutan guna berbagi permasalahan dan solusi di antara *stakeholder* yang berkolaborasi.

REFERENSI

- Ansell, C & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Handoyo, E. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Pearce, D. G., dan J. M. C. E. (1983). *The Trip Index. Journal of Travel Research*.
- Sabaruddin, A., (2015). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono.(2016).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengembangan.